

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berakhirnya rezim pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998 telah mengantarkan Indonesia memasuki babak baru demokrasi. Pada tahap ini, tuntutan dari semua lapisan masyarakat untuk menerapkan sistem demokrasi menjadi tugas pertama yang harus dipenuhi oleh Pemerintah. Oleh karenanya berbagai perubahan institusional dijalankan.¹

Dengan demikian, adanya terdapat berbagai perubahan pada institusional tersebut dapat dilihat dengan dilakukannya amandemen UUD 1945. Amandemen tersebut mengubah ketentuan yang berkaitan dengan badan pemerintahan, sistem kekuasaan, adanya Pemilu multi-partai, kebebasan pers, pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM), dan perubahan signifikan lainnya. Hal tersebut, mencerminkan adanya transisi demokrasi yang menjadikan sistem politik di Era Reformasi menjadi lebih terbuka dibanding dengan zaman Orde Baru.²

Adapun ciri-ciri dari Pola relasi adalah ditandai dengan adanya adanya aktor ekonomi (pebisnis) yang berusaha melindungi kepentingannya dengan menjalin hubungan informal dan personal terhadap aktor politik atau pemerintahan. Dalam hubungan ini, karakteristik hubungan dari patron-klien antara pelaku ekonomi dengan pemerintah diwujudkan dengan adanya pola

¹SOLIHAN, Ratna. Pola relasi bisnis dan politik di Indonesia masa reformasi: Kasus rent seeking. *Jurnal Wacana Politik*, 2016, 1.1: 41-52. Hal, 45

²*Ibid.*

hubungan yang bersifat informal dan personal. Hal tersebut dilakukan aktor bisnis untuk memperoleh berbagai perlindungan, konsesi, dan proyek yang disediakan pemerintah.³

Relasi bisnis dan politik di aras lokal ditandai dengan terpilihnya pengusaha atau pebisnis sebagai Kepala Daerah maupun anggota legislatif daerah. Pengusaha atau pebisnis memainkan perannya sebagai kepala daerah sekaligus sebagai pemilik perusahaan, dengan mengadakan proyek-proyek maupun melalui kebijakan yang ia buat untuk memperkaya diri ataupun keluarganya.⁴ Perubahan rezim dan sistem politik beserta pembangunan ekonomi pasca Orde Baru juga berakibat pada hubungan antara penguasa dan pengusaha atau negara dan kapital kutub politik yang awalnya hanya berpusat pada istana malahan telah menyebar ke sejumlah daerah⁵.

Pasca jatuhnya rezim orde baru dan masuknya era reformasi. Oligarki tetap menjulang dalam dunia perpolitikan. Reformasi masih belum mampu untuk mengubah politik oligarki meski rezim sudah berganti, Dunia politik masih dihiasi oleh wajah-wajah pengusaha sebagian dari mereka memiliki latar politik yang kuat dan juga jaringan yang besar. Adanya hubungan antara penguasa dan pengusaha sudah lama ada di Indonesia.

Saat ini tak terhitung jumlah pengusaha yang telah berbondong-bondong untuk terjun dalam dunia politik. Sebenarnya hal ini sudah merupakan trend sejak

³*Ibid.* Hal, 46

⁴AJI, Jerry Abriel Kusuma; ADNAN, Muhammad. Relasi Bisnis dan Politik: Studi Peran Keluarga “Dewi Sri” Dalam Memengaruhi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Brebes 2017–2022. *Journal of Politic and Government Studies*, 2020, 9.03: 71-80. Hal, 1

⁵Luky Djani dan putut aryo saputro “membaca relasi negara dan kapital di tingkat lokal” hlm 108

lampau, baik di negara kita Indonesia maupun di luar negeri, banyaknya pengusaha yang sudah menguasai jabatan publik. Waktu jaman orde baru dulu, awalnya peran pengusaha hanya untuk *men-support* dan untuk hal-hal yang berbau ekonomi. Masuknya pengusaha menjadi penguasa pada perpolitikan dikarenakan pada waktu itu pemerintah kekurangan sumber dana atau modal dan akhirnya pemerintah memberikan intensif terhadap para pemilik capital swasta atau pengusaha itu sendiri yang berwujudkan kepercayaan ingin bekerja sama dengan pemerintah. Pengusaha-pengusaha ini biasanya berada dalam dukungan pemerintah dan mempunyai patron dalam kelompok kekuasaan politik-birokrasi.

Sejatinya bisnis dan politik adalah dua hal yang berbeda, yang berarti bisnis dan politik bergerak dalam bidangnya masing-masing dan mempunyai ruang atau orientasi yang berbeda pula. Bisnis berorientasi untuk keuntungan dalam hal ekonomi sedangkan jika kita melihat politik dia bergerak pada kekuasaan atau bagaimana cara untuk mempertahankan kekuasaan. Tetapi semakin kelamaan bisnis dan politik mempunyai relasi dengan cara yang simple diklasifikasikan oleh Yoshihara Kunio (1990).

Sebenarnya tidak semua pengusaha yang ada di dunia politik berdampak negatif, tetapi pengalaman empirik di negara berkembang memperlihatkan, adanya kemungkinan dari watak koruptif dwifungsi ini malah semakin bertambah besar. Pada masa sekarang sedang maraknya pengusaha yang ingin menjadi

penguasa dengan bermodalkan finansial yang lebih dari cukup, dengan begitu dia bisa menduduki atau mencalonkan diri menjadi anggota legislatif.⁶

Pada tahun 1950-an Indonesia memberlakukan suatu **Rencana Urgensi Perekonomian** (RUP) sebagai upaya untuk mengubah struktur ekonomi kolonial. Dalam kerangka rencana itu, pemerintah menempuh kebijaksanaan ekonomi yang sangat mabisius, yang dikenal dengan sebutan Program Benteng, yaitu dimana pemerintah Indonesia berusaha untuk melindungi dan mengembangkan pengusaha-pengusaha pribumi dan menekan persaingan asing.

Namun lama-kelamaan kebijaksanaan ini tidak berjalan dengan mulus dan dengan cepat merosot karena telah menjadi praktek-praktek jual beli fasilitas birokrasi yang mendominasi oleh partai-partai politik yang kebetulan sedang berkuasa dan para pendukung mereka yang menjadi klien-klien ekonominya. Sejak itu perkembangan pengusaha-klien berlangsung pada setiap periode sejarah politik Indonesia. Sementara pemerintah-pemerintah yang silih berganti menjadi penguasa mengembangkan kebijaksanaan proteksi.⁷

Sekelompok pengusaha yang sangat bergantung pada kepada patronase pemerintah dan partai politik telah muncul sejak tahun 1950-an, yang berkembang dari berbagai kegiatan ekonomi dalam kerangka kebijaksanaan pembangunan. Pola operasi pengusaha-pengusaha itu berubah terus sebagai akibat dari perubahan-perubahan dalam kondisi-kondisi dunia usaha, seperti : peran

⁶Laode Saripudin Daud, Dkk. 2019. “*relasi pengusaha dan penguasa*” Literacy Institute, Kediri. Hlm 1-2

⁷Yahya A. Muhaimin “Bisnis dan Politik (kebijaksanaan ekonomi di Indonesia 1950-1980 hlm 5-6”

pemerintah dalam bidang usaha, persyaratan-persyaratan untuk memperoleh lisensi, aturan main, sumber-sumber patronase dan sebagainya.⁸

Perubahan-perubahan dalam dunia usaha erat kaitanya dengan aparat birokrasi Indonesia yang patrimonial. Kaitan itu juga terlihat dalam konsekuensi-konsekuensinya seperti penyalahgunaan kekuasaan birokrasi, dan dengan gaya konsumsi yang mencolok dan sebagainya. Yang selanjutnya menjurus ke arah ketimpangan distribusi pendapatan dalam masyarakat, yang dihasilkan oleh pertumbuhan.⁹

Masuknya pengusaha ke dalam politik tentu bukan hal yang baru lagi. Adanya relasi antara kelompok pengusaha dengan kelompok elite yang berkuasa atau penguasa sudah terjalin secara dinamis dan juga merupakan perwujudan dari kerangka struktural politik dan ekonomi. Adanya desentralisasi, membangun kembali dan memberi kenyamanan berbagai ruang interaksi antara negara dan kapital pada tingkat lokal.¹⁰

Terdapat pula faktor-faktor yang melatarbelakangi hubungan kerjasama antara kedua kelompok tersebut antara lain:*pertama*, Struktur serta karakteristik dari ekonomi yang dijalankan oleh negara atau pasar dan penggabungan antara dua karakteristik itu.*Kedua*, Struktur dan konstelasi politik lokal yang meliputi aspek dari dominasi eksekutif atau legislatif serta jaringan sosial politik lokal.¹¹

⁸*Ibid.* Hal, 6

⁹*Ibid.* hlm 153-154”

¹⁰Luky Djani Dan Putu Aryo Saputro. *Membaca Relasi Dan Kapital Di Tingkat Lokal*. Prisma Volume 32. 2013. Hal, 109

¹¹*Ibid.* Hal, 109

Pengkajian mengenai hubungan antara negara ataupun politik dengan kapital atau bisnis terjadi yang di Indonesia sejauh ini terpecah ke dalam dua prespektif yang terbentuk pada *state-center* (kutub Negara) dan *society-center* (kutub masyarakat).¹² Kutub yang tersentral pada negara memiliki prespektif jika negara merupakan komponen dominan yang memiliki kendali atas relasi antara penguasa dengan pengusaha.

Sedangkan kutub yang tersentral pada masyarakat memiliki pandangan bahwa kekuatan dari golongan-golongan masyarakat, termasuk kelompok serta asosiasi bisnis, mempunyai pengaruh dan mengatur hubungan itu. Mereka dari kalangan kelompok bisnis yang mempunyai finansial kuat mampu memerintah dan mengatur kebijakan pemerintah.¹³

Dalam jurnal yang berjudul Relasi Kuasa Dan Bisnis. *Maneksi* yang di tulis Pessireron, Marcus Frets; Moriolkosu, Justintje A. Retracted Relasi politik pada kelompok penguasa memungkinkan bagi kelompok pengusaha untuk membangun pola-pola kerjasama melalui pendekatan sosial dan kekeluargaan. Sementara hubungannya dengan kekuasaan dan ekonomi politik dalam kerangka atmosfer politik ialah perusahaan hanya memanfaatkan sumber daya alam dan mengesampingkan dampak negatif terhadap lingkungan sehingga memicu proses terjadinya degradasi lingkungan hidup.¹⁴

Dalam jurnal yang berjudul Relasi Kuasa Dan Bisnis di tegaskan, bahwa pola hubungan diantara kelompok penguasa dan kelompok pengusaha tidaklah

¹²*Ibid.* Hal,

¹³*Ibid.* Hal, 110

¹⁴Pessireron, Marcus Frets; Moriolkosu, Justintje A. Retracted: Relasi Kuasa Dan Bisnis. Jurnal Maneksi, 2020, 9.1: 290-303. Hal, 291

sesederhana seperti yang dinarasikan dalam konsep *state capture* yang diwarnai dengan pola hubungan diantara kelompok elite yang berkuasa dengan kelompok bisnis. Hal ini ditunjukkan jikalau kelompok pengusaha ingin merengkuh langsung kepada sumber daya publik, beberapa diantara mereka menduduki jabatan publik, termasuk kursi parlemen. Sedangkan, relasi yang terbangun dengan *profil ekonomi* didominasi oleh sektor publik (*state driven-economy*) yang membuat pengusaha menjadi sangat tergantung pada kelompok-kelompok elite berkuasa yang dengan demikian bertolak belakang dengan konsep *state capture*.¹⁵

Perkara korelasi penguasa serta pengusaha yang tidak cukup menguntungkan masyarakat kecil ini sebenarnya telah berawal semenjak dari masa orde baru. Para penguasa sedemikian rupa menempatkan jejaring kekuasaan (*the web of power*) sebagai tempat bergantungnya golongan atau kelompok lapisan para pengusaha. Dan pada kenyataannya pada masa reformasi malah relasi itu semakin mengakar.¹⁶

Sementara itu, penggabungan antara penguasa dan pengusaha akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang condong dan mengarah kepada para pengusaha. Pengusaha akan mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah. Malahan mereka justru dengan senang hati mau mengeluarkan dana yang cukup besar untuk mempengaruhi penyusunan kebijakan supaya

¹⁵*Ibid.* Hal, 291-292

¹⁶ Almulyadi. Relasi Penguasa Dan Pengusaha (Kajian Sosiologi Politik Masyarakat Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur. 2017. Hal, 49

kepentingan mereka akan terakomodasi dengan cara-cara yang lebih bagus, bahkan mampu menjurus ke manipulatif.¹⁷

Dengan alasan adanya urusan balas budi, seorang penguasa yang telah didanai oleh pengusaha akan condong mengutamakan kepentingan pengusaha di atas rakyat yang harus di dahulukan. Dengan demikian tugas pokok dan fungsinya sebagai penguasa yaitu mesejahterakan kehidupan rakyat dapat terabaikan.

Dalam penelitian ini saya akan menjadikan Purwanto yang sebelumnya adalah CEO dalam bidang layanan keamanan dan jasa yang sekarang sudah menjadi anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024, Purwanto merupakan salah satu Pengusaha yang terpilih menjadi anggota DPRD DKI Jakarta dengan perolehan suara terbanyak yaitu 36,782 peringkat 1 dari fraksi Gerindra.

Sebelum menjabat sebagai anggota DPRD DKI Jakarta pak Purwanto telah memberikan kontribusi kepada masyarakat kelas bawah yang telah mengalami kesenjangan ekonomi baik dari segi moralitas maupun dari segi finansialnya, dan selanjutnya berangkat dari kasus tersebut pak purwanto berjanji akan lebih melihat rakyat dan lebih mudah membantu saat dia berada di gedung parlemen.¹⁸

Bagaimana dengan latar belakang Purwanto sebagai pengusaha mampu menarik suara masyarakat banyak dalam pemilihan Legislatif pada 2019 lalu. Bahkan dalam berita baru-baru ini. Purwanto digadang-gadang menjadi salah

¹⁷*Ibid.* Hal, 49

¹⁸Haryanto Puguh, *Jadi Caleg Gerindra Pengusaha Ini Ingin Bantu Masyarakat*, 2019.. <https://metro.sindonews.com/berita/1394808/170/jadi-caleg-gerindra-pengusaha-ini-ingin-bantu-masyarakat-jakarta>, Di akses rabu 03 agustus, 2022

satu calon pemimpin jakarta di masa depan, Purwanto memiliki rekam jejak yang aspiratif peduli dan rajin turun untuk ikut andil menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Saat ini hubungan Purwanto dengan ketua DPD partai gerindra M.Taufik terjalin sangat baik dan beliau bahkan menyebut Purwanto sebagai pahlawan partai.ia menilai bahwa Purwanto sukses menjalankan seluruh instruksi dan amanat partai Gerindra. Selain itu tokoh-tokoh masyarakat Jakarta selatan sangat menyukai figure dari Purwanto itu sendiri.¹⁹ Selama berkiprah dalam dunia politik Purwanto gemar bersilaturahmi dengan warga sekitar, bahkan banyak warga yang senang dengan sosok Purwanto sendiri.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan latar belakang yang sudah di jelaskan diatas, bisa kita lihat bahwa pak purwanto sendiri adalah orang yang baru bergabung dalam partai politik , hal yang menarik disini adalah bagaimana pak purwanto yang awalnya adalah seorang pengusaha dan baru dalam politik bisa meraih suara terbanyak dalam pemilihan legislatif 2019 lalu, padahal bisa kita lihat bahwa banyak yang lebih dulu masuk ke dunia perpolitikan bahkan kalah suara dengan pak purwanto. Harusnya untuk memasuki dunia perpolitikan itu perlunya proses dan bukan hanya soal modal ekonomi saja.

¹⁹<https://rm.id/baca-berita/parlemen/97982/dekat-rakyat-anggota-dprd-purwanto-disebut-calon-pemimpin-masa-depan-dki> diakses pada 30 september 2021

1.3.Pertanyaan penelitian

1. Mengapa Purwanto Ingin Menjadi Anggota DPRD DKI Jakarta Tahun 2019 ?
2. bagaimana relasi yang terjalin antara Purwanto dengan penguasa ?
3. Bagaimana Cara Purwanto Dapat Terpilih Dalam Pemilihan DPRD DKI Jakarta Selatan Tahun 2019 ?

1.4.Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui tentang bagaimana relasi penguasa dan pengusaha pada pemilihan legislatif di jakartapada Purwanto dengan elit Gerindra dan sebenarnya hal apa yang membuat Purwanto untuk ikut serta dalam pemilihan Legislatif pada 2019 lalu. Dan diharapkan penulis mampu mendeskripsikan hasil penelitian yang menggambarkan rujukan solusi penelitian yang dilakukan.

1.5 Kegunaan Penelitian

penelitian ini untuk menambah wawasan kita tentang relasi bisnis itu sendiri dan bisa memberikan pengetahuan atau pemahaman untuk pembaca terkait praktik nyata antara penguasa dan pengusaha.Dan bisa digunakan untuk

kepentingan akademik tentang relasi pengusaha dan penguasa yang ada di Indonesia khususnya di daerah jakarta pada pemilihan anggota legislatif.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulis akan membagi menjadi 7 bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menjadi pembuka dan akan menjelaskan apa yang melatar belakangi penelitian yang akan diteliti dan juga rumusan masalah yang akan di bahas, tujuan penelitian serta apa saja kegunaan dari penelitian . Dan selanjutnya bagaimana sistematika penulisan pada skripsi ini.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini adalah bagian kedua dalam penulisan skripsi, disini akan dijelaskan tentang teori-teori apa saja yang akan di acuan untuk menganalisis latar belakang masalah yang ada. Adapun teori yang penulis pakai adalah teori elit politik dari suzanne keller , teori elit kekuasaan menurut dan yang terakhir teori power seeking dari herndando de soto.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Padabab ini penulis akan didukung oleh beberapa pendekatan penelitian dan juga teknik apa saja yang akan di gunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data dan data tersebut akan lebih akurat karena penulis akan mewawancarai narasumber yang terlibat langsung dalam pengusaha yang sekarang sudah menjadi anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-

2024 dan juga anggota timses atau tim pendukung dari pengusaha tersebut serta elit partai politik gerindra dan yang terakhir kosultan politik yang miliki pandangan tentang relasi pengusaha dan penguasa.

BAB IV GAMBARAN UMUM

Pada bab ini penulisan akan menunjukkan hasil penelitian dan juga membahas tentang rumusan masalah yang ada, dengan mengaitkannya dengan teori yang sudah ada.

BAB V FAKTOR PENDORONG PURWANTO MENGIKUTI KONTESTASI PEMILIHAN LEGISLATIF DPRD DKI JAKARTA TAHUN 2019

Pada bab ini akan berisi tentang apa saja faktor yang mendorong Purwanto untuk mengikuti pemilihan legislatif dan siapa saja yang mendorong dia untuk mengikuti pemilihan legislatif

BAB VI PROSES POLTIK PURWANTO DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF DPRD DKI JAKARTA SELATAN TAHUN 2019

pada bab ini akan menjelaskan tentang proses apa saja yang dilalui oleh Purwanto dalam kemenangannya dan juga peran dari partai Gerindra yang mengusung Purwanto dalam pemilihan legislatif 2019.

BAB VII PENUTUP

Daftar pustaka adalah susunan atau rujukan yang terletak pada akhir kalimat dari karya ilmiah ataupun skripsi yang mencakup nama penerbit, judul buku ataupun jurnal yang telah dipakai dalam peneitian.